

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN

2013 - 2018



DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Angkatan 45 No. 2440, PALEMBANG

PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan petunjuknya, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2018 dalam rangka menindaklanjuti Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 pada Tanggal 28 Januari 2014.

RENSTRA ini disusun dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai acuan dan pedoman guna menyusun kerangka kebijakan, sasaran dan tujuan pembangunan sektor pertambangan dan energi di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Palembang, APRIL 2014

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ROBERT HERI
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP. 196402051993031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS	8
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola	11
3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS.....	16
1. Gambaran Umum	16
2. Hasil-hasil yang Telah Dicapai	17
3. Analisis Isu-isu Strategis	23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	27
1. Visi	27
2. Misi	28
3. Tujuan dan Sasaran	29
4. Strategi	30
5. Kebijakan	31
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	33
BAB VI INDIKATOR KINERJA SESUAI TUJUAN DAN SASARAN ..	37
BAB VII PENUTUP	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2008 – 2012	14
2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2008 – 2012	15
3.1	Faktor-faktor Internal	23
3.2	Faktor-faktor Eksternal	24
3.3	Matriks SWOT	24
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	32
6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode Tahun 2014-2018	37

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.1	Alur Perencanaan dan Keterkaitan Renstra SKPD	3
1.2	Alir penyusunan Renja SKPD berdasarkan hasil capaian Renstra SKPD	6
2.1	Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011)	11
3.1	Tren Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Pemprov Sumsel (2008-2012)	18
3.2	Tren PNBP Batubara Pemprov Sumsel (2008-2012)	18
3.3	Tren PAD Dinas Pertamben Prov. Sumsel (2008-2012)	19
3.4	Tren Produksi Batubara Sumatera Selatan (2008-2012)	19
3.5	Tren Lifting Minyak dan Gas Bumi Sumatera Selatan (2008-2012)	20
3.6	Produksi Pembangkit PLN Sumatera Selatan (2008-2012)	20
3.7	Produksi Pembangkit Swasta Sumatera Selatan (2008-2012)	21
3.8	Tren Rasio Elektrifikasi Sumatera Selatan (2008-2012)	21
3.9	Realisasi Belanja Langsung dan Komposisi Belanja APBD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (2008-2012)	22



1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan upaya pelaksanaan amanat dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 yang terkait dengan pembagian urusan dan kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam hal ini energi dan sumberdaya mineral.

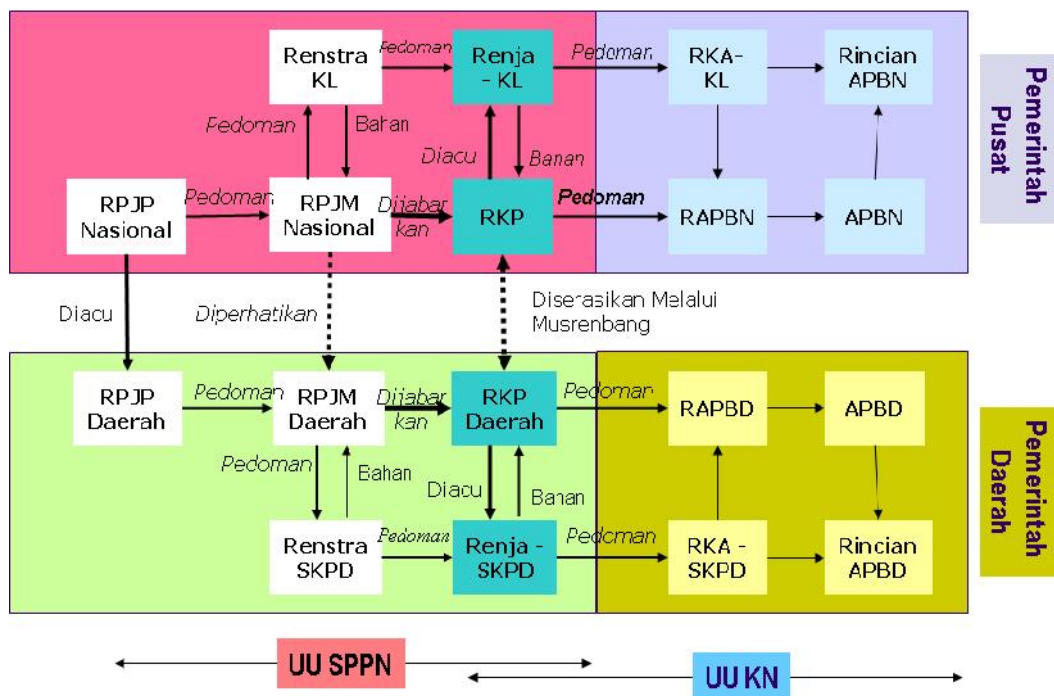
Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk struktur organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya untuk kepentingan daerah dalam kerangka ekonomi wilayah guna kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagai wujud implementasinya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan umum, pengawasan terhadap pihak perusahaan pertambangan dan lebih peduli terhadap lingkungan serta menjalin kualitas koordinasi dalam rangka pembangunan kelistrikan di Sumatera Selatan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan itu, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 serta Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, maka instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik diminta maupun tidak, dengan didasarkan perencanaan strategis yang ada yang dilaksanakan secara periodik (tahunan) selama 5 (lima) tahun.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang struktur organisasi di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan pemanfaatan energi serta pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah untuk kepentingan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan terus berbenah dalam menyusun rencana strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disesuaikan dengan *visi dan misi Gubernur periode 2013 – 2018*, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018.



Gambar 1.1 Alur perencanaan dan keterkaitan Renstra SKPD

Perencanaan strategis merupakan suatu proses partisipatif yang memerlukan dukungan seluruh anggota organisasi pada setiap tingkatan organisasi SKPD, seperti bidang dan seksi. Perencanaan strategis sangat memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan (pihak swasta dan masyarakat) dan pembuat kebijakan (kementerian ESDM) dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu.

Beberapa program/kegiatan di periode RENSTRA sebelumnya ditiadakan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Oleh karena itu, agar proses perencanaan ini dapat berjalan sesuai prosedur maka disusunlah secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan suatu Rencana Strategis (**RENSTRA**) yang berisikan **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM** dan **KEGIATAN** organisasi / instansi/unit kerja.

1.2 Landasan Hukum Renstra

- a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- h. Instruksi Presiden RI (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- i. Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Renstra atau dokumen perencanaan daerah adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi strategi, program, dan kegiatan daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- p. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008.
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.3 Maksud dan Tujuan

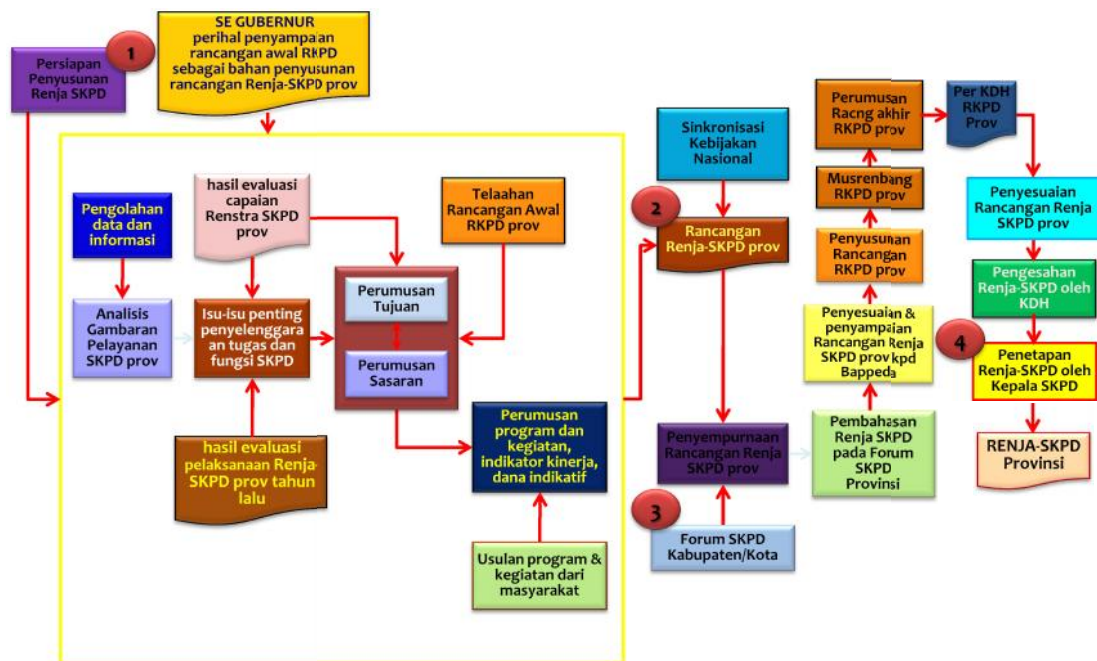
a. M a k s u d

Penyusunan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan ini adalah sebagai arah, pedoman, landasan dan strategi dalam penyusunan perencanaan sektor Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan juga merupakan indikator pengukuran kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018).

b. T u j u a n

Disusunnya Renstra ini, bertujuan sebagai dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman penyelenggaraan

program dan kegiatan guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan serta sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja instansi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel tiap tahun berdasarkan Rencana Kerja (Renja SKPD), seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Alir penyusunan Renja SKPD berdasarkan hasil capaian Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Hukum Renstra
 - 3. Maksud dan Tujuan
 - 4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN**
 - 1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi
 - 2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola
 - 3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI**
 - 1. Gambaran Umum
 - 2. Hasil-hasil yang Telah Dicapai Lima Tahun Sebelumnya
 - 3. Analisa Isu-isu Strategis

- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan dan Sasaran
 - 4. Strategi
 - 5. Kebijakan

- BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- BAB VI INDIKATOR KINERJA SESUAI TUJUAN DAN SASARAN**

- BAB VII PENUTUP**



2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi:

a. Tugas

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur tersebut diatas menegaskan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

b. Fungsi

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur tersebut diatas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

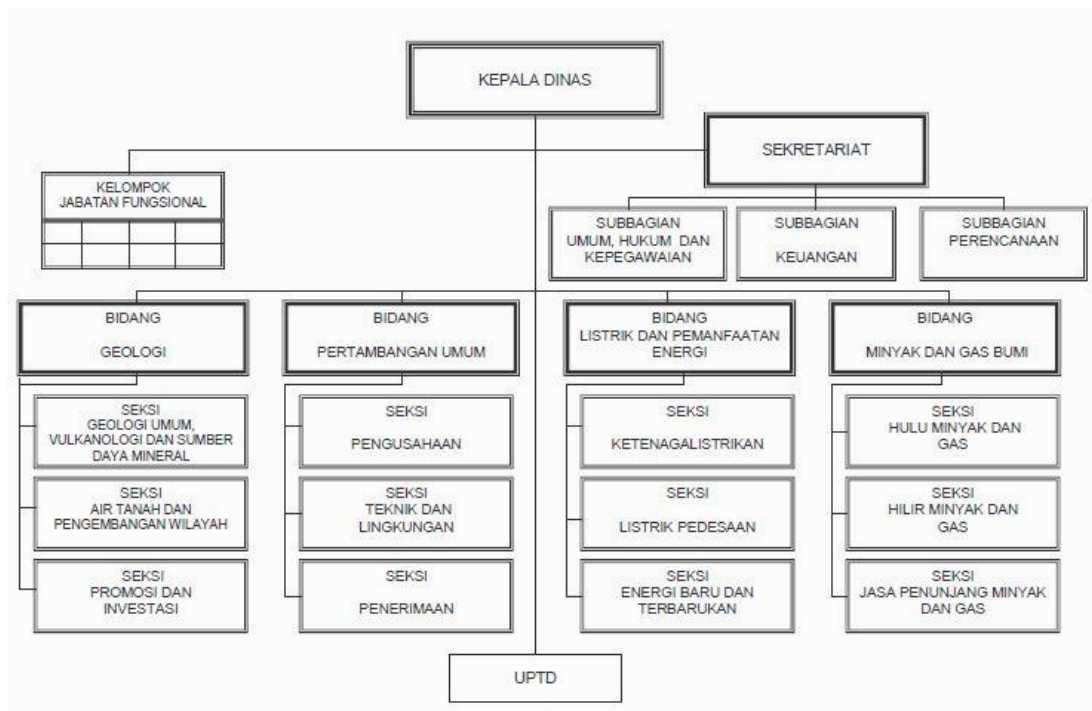
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi;
- 2) perencanaan, penyusunan program, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;
- 3) pemantauan, pengawasan, penertiban pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan usaha pertambangan air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;

- 4) menginvestasikan, penyelidikan, analisa dan evaluasi, penyajian data/informasi serta pengembangan potensi geologi, sumberdaya mineral dan air tanah;
- 5) pemberian izin atau rekomendasi dan pembinaan di bidang usaha pertambangan dan air tanah, bahan galian, energi listrik dan migas serta pengembangan wilayah tata ruang;
- 6) pemberian rekomendasi dan izin usaha ketenagalistrikan;
- 7) penyediaan pelayanan data dan informasi di bidang geologi, pertambangan dan energi;
- 8) penganalisaan laboratorium kualitas air, bahan galian batubara, mineral, migas, mekanika tanah.
- 9) pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan potensi air tanah, bahan galian, energi listrik dan migas;
- 10) pemantauan, pencatatan, pengawasan pelaksanaan sarana dan prasarana lokasi penampungan, penyimpanan, distribusi pengangkutan, pemanfaatan air tanah, pemasaran bahan galian, energi listrik dan migas serta aktifitas gunung api;
- 11) pelaksanaan konservasi energi dan pemanfaatan air tanah, bahan galian serta melaksanakan pengembangan energi listrik dan migas;
- 12) pengelolaan pajak iuran tetap, royalti dan atau retribusi di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas;
- 13) penyuluhan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;
- 14) pengelolaan dukungan teknis, administrasi serta promosi dan investasi di bidang pertambangan dan energi;
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi (Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011, pasal 70), seperti Gambar 3 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Geologi, membawahi :
 - 1. Seksi Geologi Umum, Vulkanologi dan Sumberdaya Mineral;
 - 2. Seksi Air Tanah dan Pengembangan Wilayah;
 - 3. Seksi Promosi dan Investasi.
- d. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Pengusahaan;
 - 2. Seksi Teknik dan Lingkungan;
 - 3. Seksi Penerimaan.
- e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Listrik Pedesaan;
 - 3. Seksi Energi Baru dan Terbarukan.
- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi :
 - 1. Seksi Hulu Minyak dan Gas;
 - 2. Seksi Hilir Minyak dan Gas;
 - 3. Seksi Jasa Penunjang Minyak dan Gas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011)

2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset

1. Sampai dengan bulan April 2013, Keadaan Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Tenaga administratif/teknis Struktural 83 orang PNS
 - b. Tenaga Fungsional (arsiparis) 2 orang
 - c. Tenaga *outsourcing* 22 orang

PENDIDIKAN			KEPANGKATAN			USIA		
Ijazah	PNS	%	Gol	PNS	%	Tahun	PNS	%
S.3	1	1,20	IV	11	13,25	>= 50	29	87,88
S.2	12	14,46	III	62	74,70	41-49	33	100,00
S.1	43	51,81	II	10	12,05	31-40	20	60,61
Diploma	6	7,23	I	-	-	20-30	1	3,03
SMU/SMP	21	25,30						
Jumlah	83			83			83	

Sumber : DUK Pegawai Dinas Pertambangan & Energi sampai dengan Oktober 2013

2. Aset yang dikelola

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan Kediklatan pada Dinas Pertambangan dan Energiprovinsi sumatera Selatan terdiri dari :

a. Ruang Kantor

Gedung kantor sebagai Pusat Administrasi dirasakan sudah cukup memadai sebagai ruang kerja, namun masih dirasakan adanya kekurangan fasilitas kerja. Selain itu, juga terdapat ruang-ruang kerja antara lain: ruang perpustakaan, aula, mushola, koperasi yang cukup memadai, namun sarana prasarana seperti komputer, LCD dan ATK masih perlu dilakukan peremajaan sekaligus penambahan.

b. Kendaraan Operasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan memiliki sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 unit, sedangkan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 8 unit.

NO	ASET TETAP	NILAI (RP)
1	Tanah	13.693.000.000
2	Bangunan Gedung	5.594.393.500
3	Alat Angkut (Kendaraan Dinas)	1.925.527.500
4	Alat Laboratorium	921.609.018
5	Alat Bengkel	527.317.200
6	Buku Perpustakaan	393.220.000

Sumber : Laporan Neraca Keuangan Distamben 2013 (unaudited)

2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran.

1. Jenis Pelayanan

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan kepada seluruh *stakeholder* sektor pertambangan dan energi dalam rangka peningkatan kualitas perizinan jasa peralatan eksplorasi. Selain itu, upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten dan perusahaan yang mengelola sektor energi dan pertambangan dengan memperhatikan lingkungan, berdasarkan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi dinas.

2. Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan adalah pembinaan terhadap aparatur PNS Pemerintah Kabupaten / Kota dan masyarakat serta pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan energi.

BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
PERTAMBANGAN UMUM	<ul style="list-style-type: none">Izin Usaha PertambanganMonitoring dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan	PERUSAHAAN BATUBARA (LINTAS KABUPATEN), PNS KAB/KOTA
MINYAK DAN GAS	<ul style="list-style-type: none">Surat Keterangan TerdaftarMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan	MASYARAKAT DAN SWASTA
LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	<ul style="list-style-type: none">Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	PERUSAHAAN, PNS KAB/KOTA
UPTD LABOR DAN PERALATAN EKSPLORASI	<ul style="list-style-type: none">Analisis laboratoriumJasa peralatan eksplorasiSIG	MASYARAKAT DAN SWASTA
GEOLOGI	<ul style="list-style-type: none">Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	MASYARAKAT DAN SWASTA
SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none">Data, informasi, Koordinasi dan pelaporan	PNS KAB/KOTA

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2008 - 2012

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	PNBP Minyak Bumi (Rupiah)	216.311.000.000	290.000.000.000	251.681.682.730	178.867.106.000	301.867.315.470	202.229.812.666	155.554.791.428	244.318.029.780	239.059.182.700	282.184.157.399	93,49	53,64	97,07	133,65	93,48
2	PNBP Gas (Rupiah)	443.000.000.000	309.000.000.000	614.562.448.143	484.325.202.000	641.103.212.845	327.865.321.374	282.060.152.348	535.752.532.408	609.727.914.900	695.895.832.758	74,01	91,28	87,18	125,89	108,55
3	PAD (Rupiah)	20.500.000	20.500.000,00	37.500.000	37.500.000	75.420.000	11.363.094	28.129.750	19.915.500	35.100.135	76.453.185	55,43	137,22	53,11	93,60	101,37
4	Royalty (Rupiah)	28.740.773.000	40.000.000.000	52.427.392.910	51.427.392.900	120.216.091.727	34.450.107.045	61.252.632.963	74.657.500.581	120.216.091.727	137.727.404.097	119,86	153,13	142,40	233,76	114,57
5	Landrent (Rupiah)	500.000.000	500.000.000	1.396.743.800	1.606.255.000	2.318.378.242	867.330.794	1.294.362.255	1.218.499.459	3.070.750.128	3.844.276.169	173,47	258,87	87,24	191,17	165,82
6	Produksi Batubara (Ton)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	16.000.000	23.500.000	11.086.509	13.084.782	15.324.532	20.020.669	25.302.942	123,18	145,39	170,27	125,13	107,67
7	Produksi Minyak Bumi (Ribu Barrel)	28.750	28.750,00	28.500	28.400	28.300	27.933	27.099	25.407	25.076	26.720	97,16	94,26	89,15	88,29	94,42
8	Produksi Gas Alam (Ribu MMBTU)	400.000	400.000	420.000	440.000	470.000	434.109	553.901	569.538	578.653	605.111	108,53	138,48	135,60	131,51	128,75
9	Rasio Elektrifikasi (%)	57,50	57,50	60	62	65	55	57	60,87	60,37	66,77	96,19	99,98	101,45	97,37	102,72

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2008 - 2012

No	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	ANGGARAN	REALISASI
A	APBD	15.955.245.555	25.789.633.378	19.523.724.865	19.403.414.000	20.406.519.553	16.112.009.417	15.809.348.132	16.889.595.732	16.704.208.584	18.651.752.106	100,98	61,30	86,51	86,09	91,40	20.215.707.470	16.833.382.794
1	- Belanja Langsung	11.702.397.430	20.601.775.000	14.216.615.713	12.520.000.000	13.770.000.000	11.419.009.142	11.107.831.802	12.388.884.232	10.372.360.619	12.763.340.158	97,58	53,92	87,14	82,85	92,69	14.562.157.629	11.610.285.191
2	- Belanja Tidak Langsung	4.252.848.125	5.187.858.378	5.307.109.152	6.883.414.000	6.636.519.553	4.693.000.275	4.701.516.330	4.500.711.500	6.331.847.965	5.888.411.948	110,35	90,63	84,81	91,99	88,73	5.653.549.842	5.223.097.604
B	APBN	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.214.113.000	964.863.120	995.235.525	993.067.899	822.178.650	1.152.354.600	96,49	99,52	99,31	82,22	94,91	1.042.822.600	985.539.959
JUMLAH (A+B)		16.955.245.555	26.789.633.378	20.523.724.865	20.403.414.000	21.620.632.553	17.076.872.537	16.804.583.657	17.882.663.631	17.526.387.234	19.804.106.706	100,72	62,73	87,13	85,90	91,60	21.258.530.070	17.818.922.753

3.1 Gambaran Umum

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam melimpah, terutama potensi sumber daya energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan *Coal Bed Methan* (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro.

Melimpahnya potensi energi primer seperti gas bumi, batubara dan panas bumi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di Sumatera Selatan dan daerah sekitarnya melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik. Jenis pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan potensi energi primer seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan batubara dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB). Sedangkan untuk pemanfaatan batubara di Sumatera Selatan untuk PLTU umumnya terletak dekat dengan sumber gas bumi

Potensi energi primer yang berlimpah ini merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai “Lumbung Energi”, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan ketenagalistrikan. Melimpahnya potensi energi primer, seperti Gas Bumi, Batubara dan Panas Bumi diharapkan juga akan dapat menjawab kelangkaan listrik di Provinsi Sumatera Selatan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta mulut tambang dengan memanfaatkan potensi gas bumi, batubara yang memiliki kalori rendah serta Pembangkit Listrik Panas

Bumi. Selain peluang untuk memasok listrik ke wilayah lain, pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar untuk industri, komersial dan rumah tangga serta transportasi.

Potensi energi primer di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di sejumlah kabupaten/kota, yakni Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Prabumulih.

Potensi minyak bumi sebagian besar berada di Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim dengan masing-masing sebesar 272.503 MTSB dan 252.397 MTSB. Sedangkan untuk gas bumi potensi terbesar berada di Kabupaten Muara Enim 12.477 BSCF disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan potensi sebesar 9.384 BSCF.

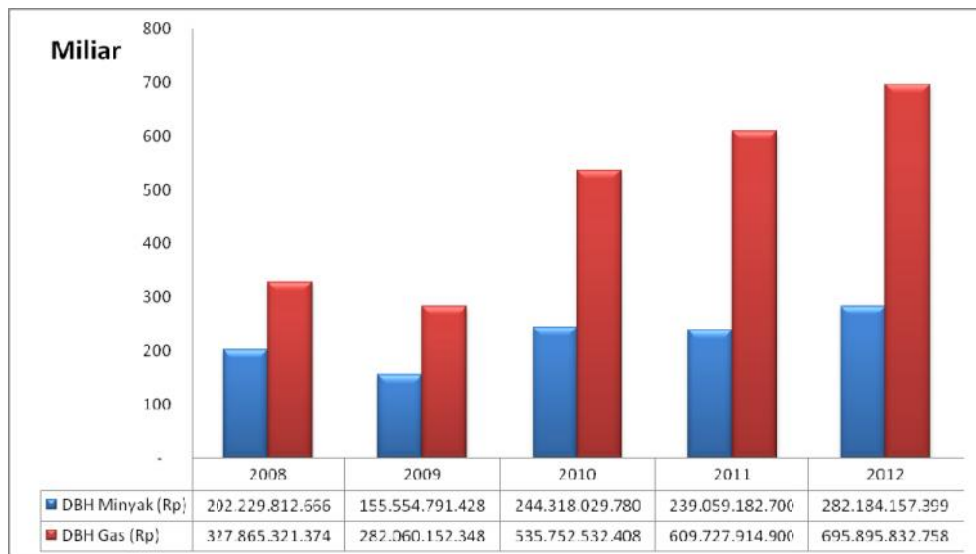
Batubara adalah sumber energi terbesar yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan cadangan sebesar 24,24 miliar ton atau 48,85 persen dari cadangan nasional yang sebesar 57,84 miliar ton, secara umum batubara di Sumatera Selatan berjenis lignit dengan kandungan kalori antara 4800-5400 kkal/kg.

Potensi CBM Sumatera Selatan tercatat sebesar 183 TCF atau 39 persen dari total potensi CBM Nasional, sedangkan potensi panas bumi sebesar 1.911 MWe yang tersebar di Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Muara Enim.

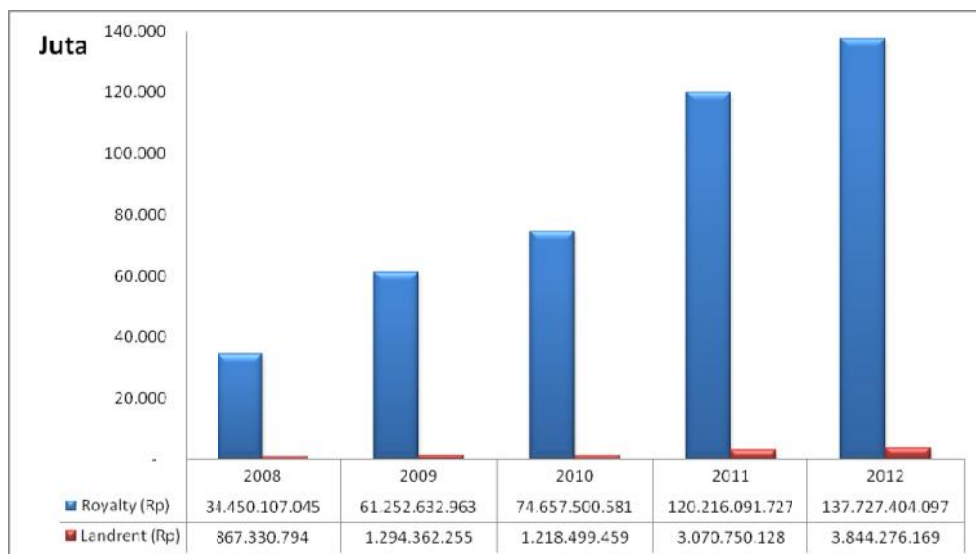
3.2 Hasil - Hasil yang Telah Dicapai Lima Tahun Sebelumnya

Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat jumlah realisasi penerimaan negara bukan pajak dari sumberdaya minyak dan gas bumi serta batubara, penerimaan asli daerah (PAD) dan ketenagalistrikan dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi yang

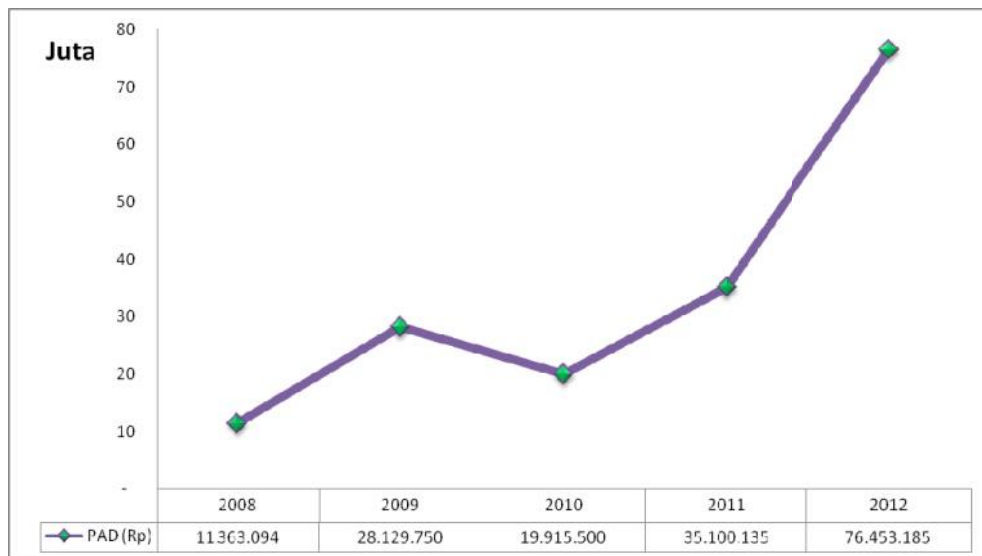
diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, seperti gambar-gambar berikut dibawah ini :



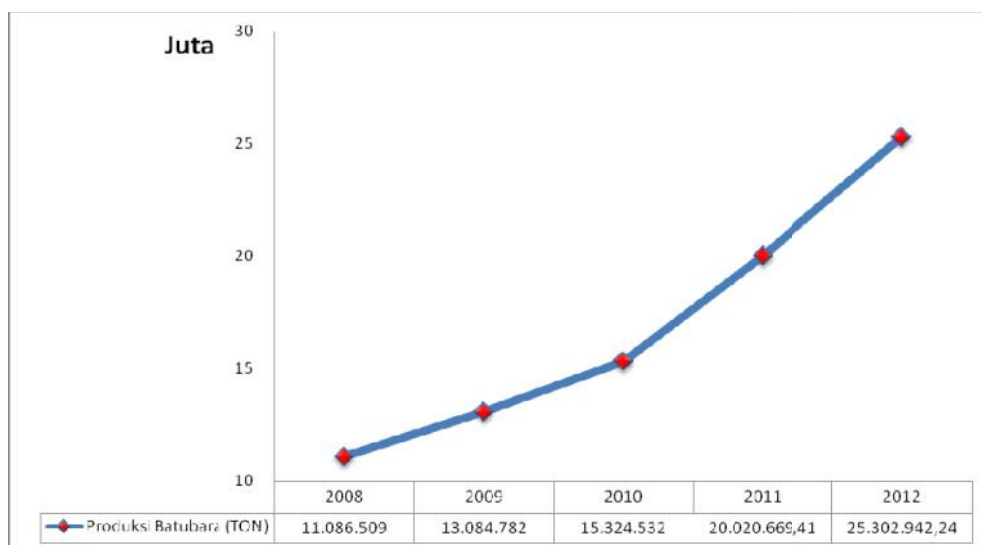
Gambar 3.1. Tren Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Pemprov Sumsel (2008-2012)



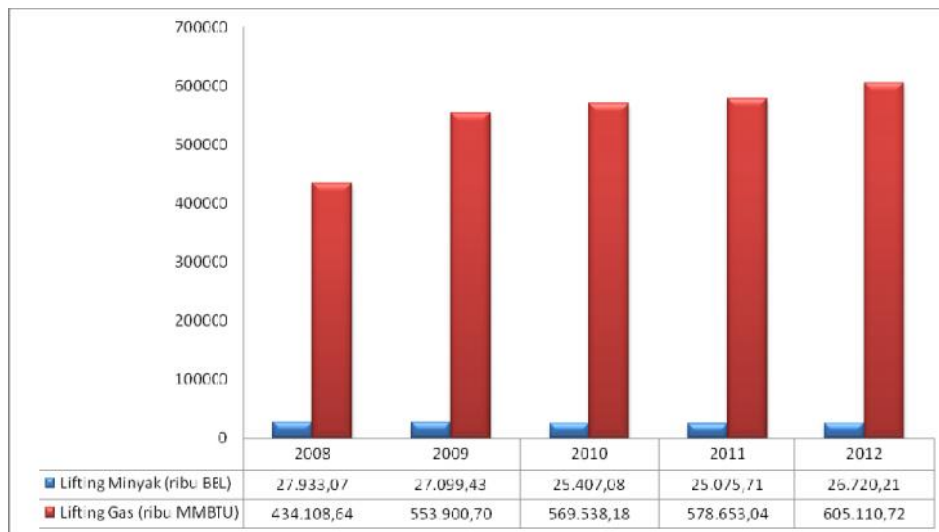
Gambar 3.2. Tren PNPB Batubara Pemprov Sumsel (2008-2012)



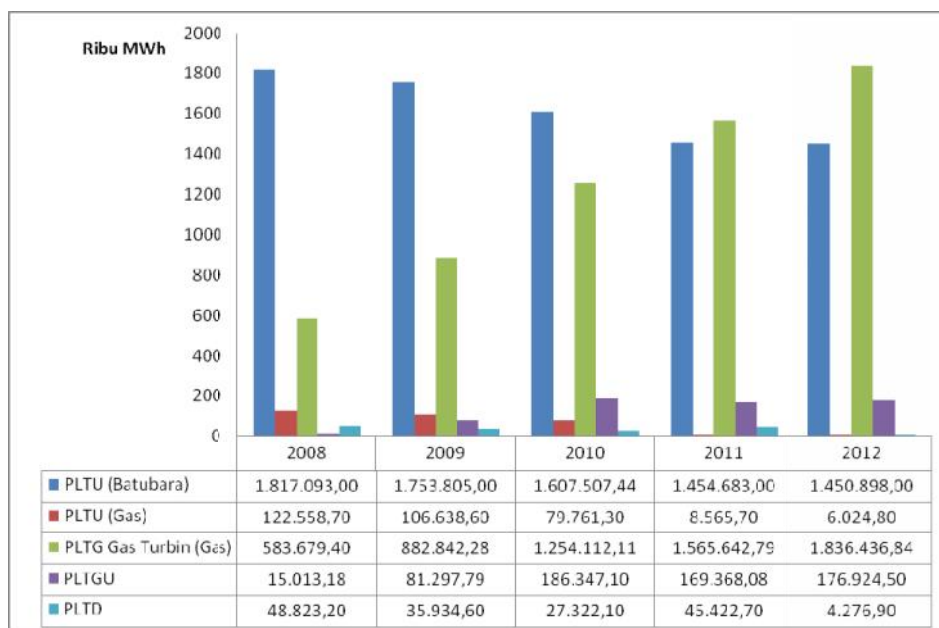
Gambar 3.3. Tren PAD Dinas Pertamben Prov. Sumsel (2008-2012)



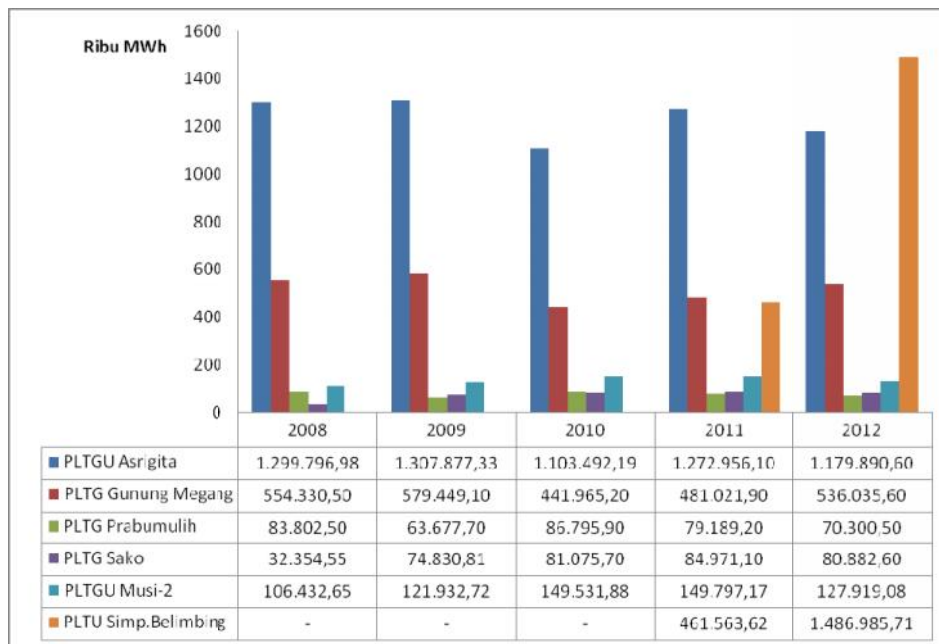
Gambar 3.4. Tren Produksi Batubara Sumatera Selatan (2008-2012)



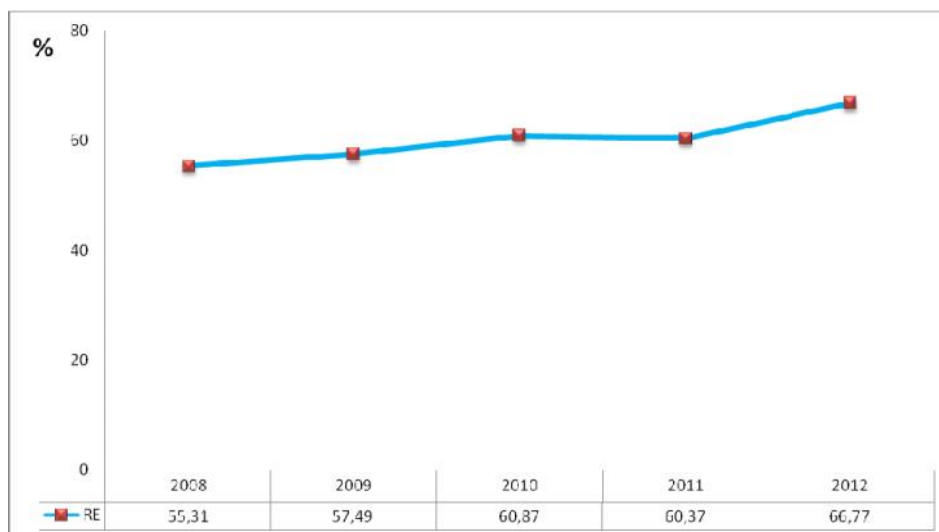
Gambar 3.5. Tren Lifting Minyak dan Gas Bumi Sumatera Selatan (2008-2012)



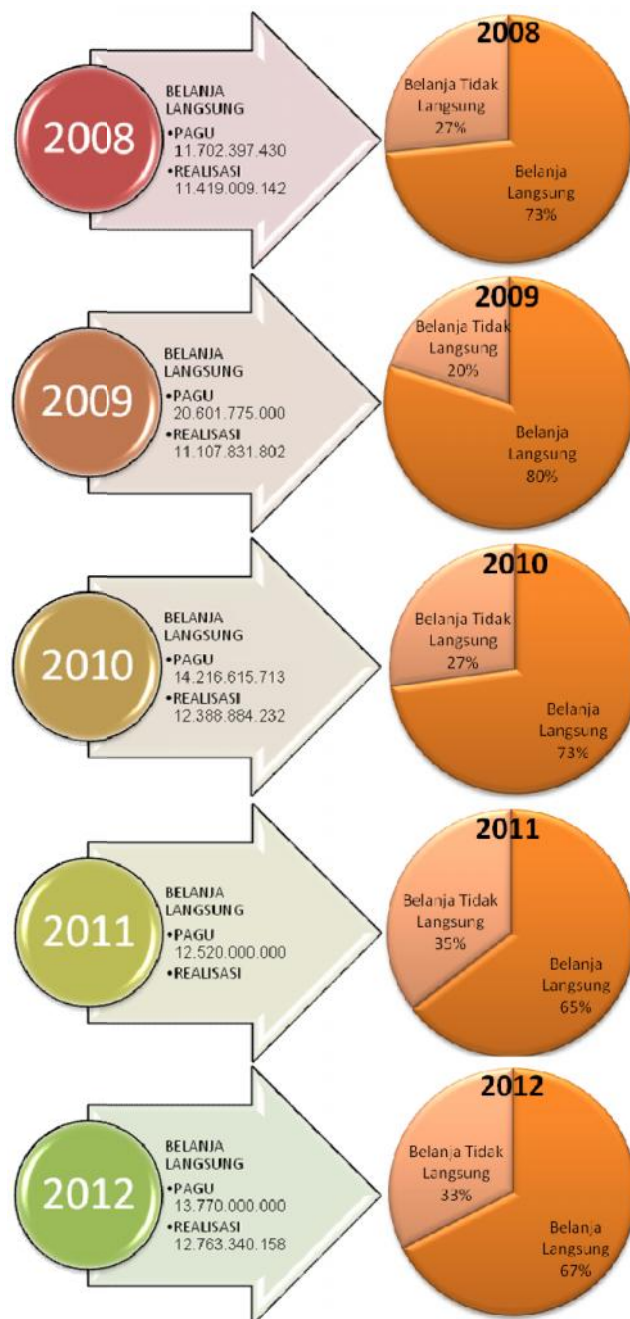
Gambar 3.6. Produksi Pembangkit PLN Sumatera Selatan (2008-2012)



Gambar 3.7. Produksi Pembangkit Swasta Sumatera Selatan (2008-2012)



Gambar 3.8. Tren Rasio Elektrifikasi Sumatera Selatan (2008-2012)



Gambar 3.9. Realisasi Belanja Langsung dan Komposisi Belanja APBD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (2008-2012)

3.3 Analisis Isu - isu Strategis

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan secara objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik secara langsung (internal) maupun secara tidak langsung (eksternal) terhadap kinerja instansi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan fakta dan kewenangan yang ada, sehingga renstra yang dibuat dapat menjadi pedoman untuk mengatasi isu aktual yang terus berkembang.

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan mempergunakan analisa SWOT, yaitu dengan menganalisa kondisi internal maupun eksternal Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta faktor yang menjadi peluang dan ancaman yang akan dan terus dihadapi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor KEKUATAN (*strength*) dan KELEMAHAN (*weakness*), sedangkan analisis eksternal mencakup faktor PELUANG (*opportunity*) dan TANTANGAN/ANCAMAN (*threaths*) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.1. Faktor-faktor Internal

NO	FAKTOR INTERNAL	S	W
1.	Jumlah SDM		✓
2.	Kompetensi SDM	✓	
3.	Prasarana dan sarana		✓
4.	Reputasi SKPD	✓	
5.	Pengalaman Kerja	✓	

Tabel 3.2. Faktor-faktor Eksternal

NO	FAKTOR EKSTERNAL	O	T
1.	Perkembangan teknologi		✓
2.	Kebijakan nasional		✓
3.	Kerjasama / kemitraan	✓	
4.	Partisipasi masyarakat	✓	
5.	Mekanisme pasar		✓
6.	Potensi Sumber Daya Alam		✓
7.	Infrastruktur Energi		✓
8.	Isu Lingkungan		✓

Tabel 3.3. Matriks SWOT

	Peluang 1. Kerjasama / Kemitraan 2. Partisipasi masyarakat	Ancaman 1. Perkembangan teknologi 2. Kebijakan nasional 3. Mekanisme pasar 4. Potensi SDA 5. Infrastruktur energi 6. Isu lingkungan
Kekuatan 1. Kompetensi SDM 2. Reputasi SKPD 3. Pengalaman Kerja	Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang: 1. Peningkatan upaya pembinaan ke Kab/Kota serta Koordinasi dengan instansi terkait 2. Peningkatan peran serta masyarakat	Strategi memakai kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman: 1. Menggiatkan upaya pengembangan energi terbarukan untuk listrik perdesaan 2. Membuat peraturan teknis sesuai kewenangan 3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kab/kota
Kelemahan 1. Jumlah Sumber Daya Manusia 2. Prasarana dan Sarana	Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang: 1. Mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat teknis 2. Meningkatkan serta Mengoptimalkan fungsi prasarana dan prasarana	Strategi memperkecil kelemahan dan mengatasi tantangan/ancaman: 1. Pembinaan dan pengawasan ke perusahaan sesuai kewenangan terkait aspek lingkungan dan peningkatan infrastruktur jalan batubara 2. Melakukan inventarisasi potensi berdasarkan data dari ESDM untuk penyusunan neraca sumberdaya mineral Sumatera Selatan

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 (empat) kemungkinan alternatif strategis, yaitu :

1. **Strategi SO (Strength and Opportunity).** Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya.
2. **Strategi ST (Strength and Threats).** Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
3. **Strategi WO (Weakness and Opportunity).** Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. **Strategi WT (Weakness and Threats).** Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Faktor Kekuatan

- 1.1. Kompetensi SDM, Secara umum sebagian besar Aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketrampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis. Beberapa diantaranya sudah mengikuti diklat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang, seperti inspektur tambang dan inspektur kelistrikan. Namun demikian, masih memerlukan upaya pengembangan kompetensi SDM guna mengadaptasi perubahan peraturan kepegawaian.

- 1.2. Reputasi SKPD, pada tahun 2011 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
- 1.3. Pengalaman Kerja

2. Faktor Kelemahan

- 2.1. Jumlah SDM, proporsi SDM teknis dan non teknis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan tidak berimbang. Selain itu, jumlah PNS yang terbatas dikarenakan banyak yang sudah pensiun namun tidak ada regenerasi yang cukup memadai.
- 2.2. Prasarana dan Sarana, dalam rangka peningkatan PAD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki laboratorium *mobile* dan motor dinas untuk pengukur kualitas dan kuantitas volume batubara di Pelabuhan. Selain itu, guna meningkatkan PAD melalui UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi masih mengandalkan aset yang lama (eks kanwil) sehingga retribusi yang diperoleh masih belum optimal.

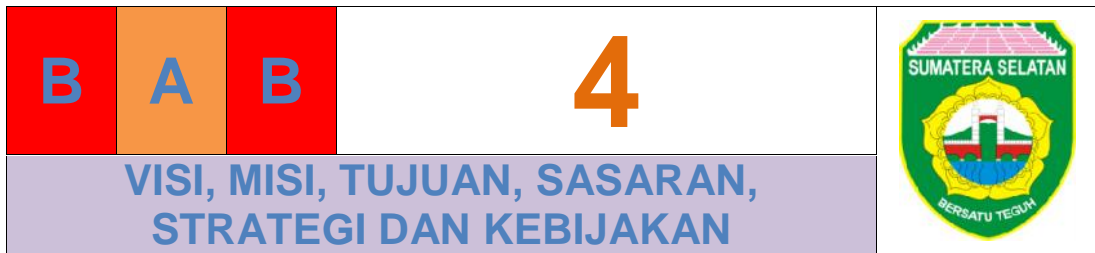
B. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Faktor Peluang

- 1.1. Kerjasama / Kemitraan, Koordinasi
- 1.2. Partisipasi Masyarakat

2. Faktor Ancaman

- 2.1. Perkembangan Teknologi
- 2.2. Kebijakan Nasional
- 2.3. Mekanisme Pasar



4.1 Visi

Era otonomi daerah sampai dengan sekarang, Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi terkaya ke lima di Indonesia berdasarkan potensi sumberdaya alam nya. Hal ini tentunya memerlukan kebijakan yang arif dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam, terutama di sektor energi dan sumberdaya mineral (ESDM) agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pilihan sektor tersebut, memerlukan dan menetapkan visi yang selaras terhadap kondisi di atas berdasarkan kewenangan yang ada, sesuai dengan peraturan perundangan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai **VISI** :

MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ENERGI, MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI SECARA BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Penetapan Visi didasari pertimbangan antara lain :

1. Potensi SDA sektor energi dan sumberdaya mineral yang belum tergali karena masih berstatus potensi sehingga masih memungkinkan untuk dapat dieksplorasi secara berkelanjutan.

2. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Sumatera Selatan yang masih terbelang rendah bila dibandingkan dengan provinsi se-Sumatera.

4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, maka disusunlah Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan yang harus diimplementasikan oleh semua unsur, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya pengelolaan sumberdaya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah;**

Penetapan Misi kesatu, didasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sub sektor Batubara dan Dana Bagi Hasil sub sektor Migas dan PAD melalui upaya pembinaan dan rekonsiliasi seluruh perusahaan yang tersebar di kabupaten/kota.

- 2) Mengembangkan sumberdaya energi lokal dan panas bumi agar dapat menjadi pendukung aktivitas ekonomi oleh masyarakat secara berkelanjutan;**

Penetapan Misi kedua, dilandasi oleh pertimbangan bahwa Sumatera Selatan mempunyai potensi SDA yang strategis, maka diperlukan upaya pengembangan sub sektor batubara, panas bumi dan mikro hidro serta energi matahari guna meningkatkan kualitas kelistrikan yang tetap berorientasi kepada ramah lingkungan.

- 3) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Pertambangan dan Energi serta penguatan jaringan kerja antar instansi;**

Penetapan Misi ketiga, dilatarbelakangi oleh kemajuan IPTEK dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga diperlukan aparatur teknis yang

berkualitas dan profesional untuk menciptakan kondisi birokrasi aparaturnya yang dinamis.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Bertitik tolak dari strategi dan perkembangan organisasi dalam mencapai keberhasilan misi yang ada, maka tahapan selanjutnya menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun mendatang.

1) Tujuan

Sebagai implementasi dari Visi dan beberapa misi yang ada maka dapatlah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

Misi Kesatu, Meningkatkan upaya pengelolaan sumberdaya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah. Melalui misi ini **Tujuan** yang ingin dicapai adalah : *Mengoptimalkan potensi sumberdaya energi dan mineral dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan produksi pertambangan dan energi guna meningkatkan penerimaan daerah,*

Misi Kedua, Mengembangkan sumberdaya energi lokal dan panas bumi agar dapat menjadi pendukung aktivitas ekonomi oleh masyarakat secara berkelanjutan. Melalui misi ini **Tujuan** yang ingin dicapai adalah : *Menggalakkan upaya pemenuhan kebutuhan energi di Sumatera Selatan serta memasok kebutuhan listrik di daerah sekitarnya.*

Misi ketiga, Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparaturnya Pertambangan dan Energi serta membentuk jejaring kerja. Melalui misi ini **Tujuan** yang ingin dicapai adalah : (1) *Meningkatkan upaya koordinasi dan pelaksanaan pertambangan dan energi yang berbasis “good mining practice”* dan (2) *Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan sektor pertambangan dan energi.*

2) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses penetapan perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur serta merupakan tantangan ke depan, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, masing-masing tujuan mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :

- Optimalisasi sektor pertambangan dan energi guna mendukung penerimaan daerah.
- Mewujudkan dan mengupayakan ketersediaan energi berbasis energi terbarukan untuk penguatan akses listrik oleh masyarakat.
- Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan upaya diversifikasi dan konservasi energi serta hemat energi
- Mewujudkan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan energi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Adanya kerjasama diklat dengan instansi terkait.

4.4 Strategi

Dengan adanya faktor faktor pendorong dan penghambat untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, perlu dirumuskan strategi yang tepat dan cermat agar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan. Adapun Strategi yang diperlukan, antara lain :

- (1) Mengupayakan peningkatan status IUP eksplorasi menjadi IUP OP Produksi melalui koordinasi dengan kabupaten/kota.
- (2) Membuat Neraca Sumberdaya Mineral, Batubara dan Migas
- (3) Membuat Peta Kawasan Kerentanan Gerakan Tanah.

- (4) Meningkatkan upaya pemanfaatan potensi sumberdaya energi lokal dengan memacu penggunaan energi baru terbarukan melalui peningkatan sarana penyaluran daya listrik perdesaan.
- (5) Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam rangka mempercepat pembangunan kelistrikan berbasis potensi SDA di Sumatera Selatan.
- (6) Mendukung dan Melaksanakan Kebijakan Pemerintah.
- (7) Mengoptimalkan aparatur PNS yang tersedia untuk memfasilitasi pengisian jabatan struktural dan fungsional.


4.5 Kebijakan

Sejalan dengan Misi Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018, yaitu :

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (**produktivitas**); melaksanakan peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan secara optimal untuk meningkatkan volume produksi batubara baik secara kuantitas dan kualitas serta upaya peningkatan pemanfaatan gas.
- (2) Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan (**ekuibilitas**); meningkatkan upaya pembangunan pembangkit listrik di wilayah yang belum terjangkau listrik PLN berdasarkan potensi energi lokal dan berbasis energi baru terbarukan
- (3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana (**sustainabilitas**); melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel dengan optimal untuk melakukan intensifikasi upaya pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan batubara dalam rangka *good mining practice*.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Mengoptimalkan potensi sumberdaya energi dan mineral dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan produksi pertambangan dan energi guna meningkatkan penerimaan daerah	Optimalisasi sektor pertambangan dan energi guna mendukung penerimaan daerah.	Jumlah produksi hasil tambang batubara (juta ton)	23,13	23,80	24,50	25,20	26,00
			Jumlah penerimaan negara bukan pajak batubara, dana bagi hasil migas dan retribusi dari usaha pertambangan	1.183	1.250	1.321	1.397	1.476
2	Menggalakkan upaya pemenuhan kebutuhan energi di Sumatera Selatan serta memasok kebutuhan listrik di daerah sekitarnya	Mewujudkan dan mengupayakan ketersediaan energi yang berbasis energi terbarukan untuk penguatan akses listrik oleh masyarakat	Jumlah Produksi Listrik (GWh)	6.678	6.878	7.085	7.298	7.517
			Rasio Elektrifikasi (%)	72,61	73,69	74,79	75,9	77,03
			Jumlah Pasokan Listrik (MW)	1.255,15	1.299,31	1.345,02	1.392,33	1.441,32
			Persentase Desa dengan Akses Listrik (%)	92,3	93,16	94,02	94,9	95,78
3	Meningkatkan upaya koordinasi dan pelaksanaan pertambangan dan energi yang berbasis <i>good mining practice</i>	Mewujudkan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan energi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	IUP	279	279	279	279	279
		Adanya kerjasama diklat dan kerjasama dengan instansi terkait.	Jumlah diklat dan koordinasi yang diikuti (tahun)	1	1	1	1	1

B	A	B	5	
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF				

Rencana program yang ditetapkan merupakan penjabaran visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan strategis.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran
11. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
12. Penyediaan Jasa Surveil Asesor KAN dan Peningkatan Mutu Pengujian Laboratorium
13. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Pengadaaan Bahan Kimia
4. Pemeliharaan Peralatan Eksplorasi
5. Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Laboratorium
6. Pemeliharaan Peralatan/Instrumen Laboratorium
7. Pengembangan UPTD Laboratorium dan Jasa Eksplorasi
8. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Pengadaan Peralatan Eksplorasi dan Geofisika
10. Pengadaan Peralatan Laboratorium

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian KORPRI
2. Pengadaan Seragam Dinas dan Olahraga

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Rapat Teknis SKPD
2. Pengumpulan dan Validasi Data Statistik ESDM

Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara

1. Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan
2. Pembinaan IUP Produksi dan Pengusahaan Pertambangan se-Sumatera Selatan
3. Rekonsiliasi Bagi Hasil PNBPN dan Produksi Batubara se-Sumatera Selatan
4. Pembinaan Pengelolaan CSR Perusahaan Pertambangan

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM

1. Monitoring Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
2. Pemantauan Gunung Api Dempo
3. Inventarisasi Data Perizinan dan Sumur Bor Air Tanah se-Sumatera Selatan
4. Pendugaan Geolistrik
5. Pemetaan Cekungan Air Tanah
6. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi dan Gerakan Kerentanan Tanah
7. Promosi Sektor Pertambangan dan Energi

Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas

1. Koordinasi Pengusahaan Migas dan FKDPM Rekonsiliasi Bagi Hasil dan Sinkronisasi Lifting Migas
2. Pengawasan Terpadu Hilir Migas

Program Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat


1. Identifikasi Potensi Mikro Hidro
2. Studi dan Rancang Bangun PLTMH
3. Pembangunan PLTMH
4. Rehabilitasi PLTMH
5. Penyediaan PLTS Tersebar
6. Penyusunan Dokumen RUED dan RUKD Provinsi Sumatera Selatan
7. Penyuluhan Hemat Energi dan Air
8. Inventarisasi dan Evaluasi Perkembangan Kondisi Kelistrikan
9. Pembangunan Jaringan Distribusi (JTR/JTM)
10. Pembinaan & Pengawasan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan
11. Rekonsiliasi Pengusahaan Panas Bumi
12. Inventarisasi Kebutuhan Listrik di Masyarakat Pesisir
13. Inventarisasi Biomass

Berikut di bawah ini matriks rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Tabel 5.1, terlampir).

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatf Dinas Pertambangan dan Energi/ Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)				
Mengoptimalkan potensi sumberdaya energi dan mineral dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan produksi pertambangan dan energi guna meningkatkan penerimaan daerah	Terwujudnya Optimalisasi sektor pertambangan dan energi guna mendukung penerimaan daerah.	Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara	33	Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP batubara menjadi 886 milyar rupiah melalui peningkatan produksi batubara 122 juta ton pada Tahun 2018	Nila PNBP Pertambangan (Royalti & Landrent) 438 milyar rupiah; produksi batubara 84,81 juta ton	152 Milyar Rupiah ; 23,13 juta ton	#REF!	164 Milyar Rupiah ; 23,8 juta ton	#REF!	176 Milyar Rupiah ; 24,5 juta ton	#REF!	190 Milyar Rupiah ; 25,2 juta ton	#REF!	204 Milyar Rupiah ; 26 juta ton	#REF!			Distamben Prov. Sumsel			
			03	- Pembinaan IUP Produksi dan Pengusahaan Pertambangan se-Sumatera Selatan	Jumlah IUP produksi batubara		26 IUP	82.720.000	26 IUP	150.000.000	26 IUP	150.000.000	26 IUP	150.000.000	26 IUP	150.000.000			682.720.000			
		Jumlah penerimaan negara bukan pajak batubara, dana bagi hasil migas dan retribusi dari usaha pertambangan	04	- Rekonsiliasi Bagi Hasil PNBP dan Produksi Batubara se-Sumatera Selatan	Jumlah IUP yang direkon		279 IUP	100.000.000	279 IUP	150.000.000	279 IUP	150.000.000	279 IUP	175.000.000	279 IUP	175.000.000			750.000.000			
			35	Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP migas menjadi 5,7 triliun rupiah; lifting minyak bumi 136,5 juta barel; lifting gas bumi 3 milyar MMBTU pada 2018	PNBP migas 3,6 triliun rupiah; lifting minyak bumi 132,24 juta barel; lifting gas bumi 2,7 milyar MMBTU	1,03 Trilyun Rupiah; 26,90 ribu barrel minyak bumi; 609 MMBTU gas bumi	153.000.000	1,08 Trilyun Rupiah; 27,11 ribu barrel minyak bumi; 613 MMBTU gas bumi	250.000.000	1,14 Trilyun Rupiah; 27,32 ribu barrel minyak bumi; 617 MMBTU gas bumi	260.000.000	1,2 Trilyun Rupiah; 27,5 ribu barrel minyak bumi; 621 MMBTU gas bumi	265.000.000	1,27 Trilyun Rupiah; 27,7 ribu barrel minyak bumi; 626 MMBTU gas bumi	270.000.000			1.198.000.000			
			01	- Koordinasi Pengusahaan Migas dan FKDPM	Jumlah koordinasi penerimaan dana bagi hasil dan pengusahaan migas se-Sumsel		4 Triwulan	103.000.000	4 Triwulan	150.000.000	4 Triwulan	150.000.000	4 Triwulan	150.000.000	4 Triwulan	150.000.000			703.000.000			
			02	- Rekonsiliasi Bagi Hasil dan Sinkronisasi Lifting Migas	Jumlah rekonsiliasi penerimaan dana bagi hasil dan lifting migas Provinsi Sumatera Selatan		4 Triwulan	50.000.000	4 Triwulan	100.000.000	4 Triwulan	110.000.000	4 Triwulan	115.000.000	4 Triwulan	120.000.000			495.000.000			
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya administrasi perkantoran	171 juta rupiah	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000			750.000.000			
			74	- Penyediaan Jasa Survalen Asesor KAN dan Peningkatan Mutu Pengujian Laboratorium	Jumlah kebutuhan survallen asesor KAN dalam pelayanan laboratorium		12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000			750.000.000			
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya penyediaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana kerja		100%	500.000.000	100%	515.000.000	100%	540.000.000	100%	565.000.000	100%	595.000.000			2.715.000.000			
			99	- Pengadaan Bahan Kimia	Jumlah kebutuhan bahan-bahan kimia labor		48 jenis	100.000.000	48 jenis	105.000.000	48 jenis	110.000.000	48 jenis	115.000.000	48 jenis	120.000.000			550.000.000			
			111	- Pemeliharaan Peralatan Eksplorasi	Jumlah pemeliharaan peralatan eksplorasi		13 jenis	150.000.000	13 jenis	155.000.000	13 jenis	160.000.000	13 jenis	165.000.000	13 jenis	170.000.000			800.000.000			
			143	- Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Laboratorium Geologi	Jumlah peralatan labor yang dikalibrasi dan dipelihara		21 unit	75.000.000	21 unit	80.000.000	21 unit	85.000.000	21 unit	90.000.000	21 unit	95.000.000			425.000.000			
			144	- Pemeliharaan Peralatan/Instrumen Laboratorium	Jumlah instrumen labor yang dipelihara		4 unit	75.000.000	4 unit	75.000.000	4 unit	80.000.000	4 unit	85.000.000	4 unit	90.000.000			405.000.000			
			152	- Pengembangan UPTD Laboratorium dan Jasa Eksplorasi	Jumlah retribusi PAD		83 juta rupiah	100.000.000	90 juta rupiah	100.000.000	97 juta rupiah	105.000.000	106 juta rupiah	110.000.000	115 juta rupiah	120.000.000			535.000.000			
			15x	- Pengadaan Alat Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi	jumlah kebutuhan alat labor dan eksplorasi		-	0	1 paket	300.000.000	-	0	-	0	-	0			300.000.000			
			36	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat	Meningkatnya pemanfaatan energi untuk kebutuhan listrik masyarakat		3 WKP	100.000.000	3 WKP	150.000.000	3 WKP	150.000.000	3 WKP	160.000.000	3 WKP	175.000.000			735.000.000			
			09	- Rekonsiliasi Pengusahaan Panas Bumi	Jumlah Pengusahaan Panas Bumi		3 WKP	100.000.000	3 WKP	150.000.000	3 WKP	150.000.000	3 WKP	160.000.000	3 WKP	175.000.000			735.000.000			
	Penyediaan data kegeologian sumber daya mineral dan energi serta gerakan kerentanan tanah yang akurat dan aktual.	Dokumen kegeologian sumber daya mineral dan energi serta gerakan kerentanan tanah	34	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM	Persentase Pemanfaatan Sumberdaya Geologian		25%	775.000.000	25%	775.000.000	25%	775.000.000	25%	775.000.000	25%	775.000.000			3.875.000.000			
			01	- Monitoring Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	Jumlah daerah rawan bencana yang direkomendasikan		4 Daerah	100.000.000	4 Daerah	100.000.000	4 Daerah	100.000.000	4 Daerah	100.000.000	4 Daerah	100.000.000			500.000.000			
			02	- Pemantauan Gunung Api Dempo	Jumlah dokumen pemantauan		1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000			375.000.000			
			03	- Inventarisasi Sumur Bor se-Sumatera Selatan	Persentase sumur bor yang masih baik		20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000			500.000.000			
			04	- Pedugaan Geolistrik	Jumlah titik sampling pedugaan geolistrik		50 titik	250.000.000	50 titik	250.000.000	50 titik	250.000.000	50 titik	250.000.000	50 titik	250.000.000			1.250.000.000			
			06	- Pemetaan Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen peta cekungan air tanah Sumsel		1 lembar	100.000.000	1 lembar	100.000.000	1 lembar	100.000.000	1 lembar	100.000.000	1 lembar	100.000.000			500.000.000			
			07	- Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi dan Gerakan Kerentanan Tanah	Jumlah dokumen pemetaan berupa data kawasan rawan bencana geologi dan Kerentanan Tanah		2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000			750.000.000			
			08	- Promosi Sektor Pertambangan dan Energi	Jumlah pameran yang diikuti		1 kali	250.000.000	1 kali	250.000.000	1 kali	250.000.000	1 kali	250.000.000	1 kali	250.000.000			1.250.000.000			
			09	- Neraca Sumber Daya Mineral	jumlah neraca sd mineral		-	0	1 dokumen	500.000.000	-	0	-	0	-	0			500.000.000			
			10	- Neraca Sumber Daya Batubara dan CBM	jumlah neraca sd batubara		-	0	1 dokumen	500.000.000	-	0	-	0	-	0			500.000.000			
			11	- Neraca Sumber Daya Migas	jumlah neraca sd migas		-	0	-	0	1 dokumen	500.000.000	-	0	-	0			500.000.000			
			12	- Neraca Sumber Daya Panas Bumi	jumlah neraca sd panas bumi		-	0	-	0	1 dokumen	500.000.000	-	0	-	0			500.000.000			
Menggalakan upaya pemenuhan kebutuhan energi di Sumatera Selatan serta memasok kebutuhan listrik di daerah sekitarnya	Mewujudkan dan mengupayakan ketersediaan energi yang berbasis energi terbarukan untuk penguatan akses listrik oleh masyarakat	Persentase Desa dengan Akses Listrik	36	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat	Meningkatnya pemanfaatan energi untuk kebutuhan listrik masyarakat	Rasio Desa Berlistrik 89,67% ; Rasio Elektrifikasi 66,77%	500 KK	5.400.000.000	500 KK	14.110.000.000	500 KK	6.720.000.000	500 KK	9.230.000.000	500 KK	6.740.000.000			42.200.000.000			
			01	- Identifikasi Potensi Mikro Hidro	Jumlah dokumen lokasi mikrohidro yang diidentifikasi di kab. OKUS		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	-	0	-	0	-	0			400.000.000			
			02	- Pembangunan PLTMH	Jumlah PLTMH		1 Unit	3.900.000.000	1 Unit	4.000.000.000	-	0	-	0	-	0			7.900.000.000			
			03	Rehabilitasi PLTMH	Jumlah PLTMH yang direhabilitasi		2 unit	700.000.000	3 unit	1.000.000.000									1.700.000.000			
			12	- Inventarisasi Pemanfaatan Genset di Masyarakat Pesisir	Jumlah dokumen inventarisasi		0	0	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000			800.000.000			
		Jumlah Pasokan Listrik	04	- Penyusunan Perda Ketenagalistrikan Prov. Sumsel	Jumlah naskah akademik		1 naskah	200.000.000	0	0	-	0	-	0	-	0			200.000.000			
			05	- Inventarisasi Potensi Biomass dan Biogas	Tersedianya data potensi energi untuk kebutuhan listrik		0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000			400.000.000			
			06	- Penyuluhan Hemat Energi dan Air	Jumlah peserta penyuluhan hemat energi dan air		100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000			500.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018					
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)		
		Rasio Elektrifikasi	07	- Inventarisasi dan Evaluasi Perkembangan Kondisi PLTS dan PLTMH Terpasang	Jumlah dokumen inventarisasi dan Evaluasi		4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	110.000.000	4 dokumen	120.000.000	4 dokumen	130.000.000	4 dokumen	140.000.000		600.000.000		
			10	- Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar	Jumlah PLTS		0	0	1000 unit	6.000.000.000	1000 unit	6.000.000.000	1000 unit	6.000.000.000	1000 unit	6.000.000.000		24.000.000.000		
			11	- Pemasangan Jaringan Listrik untuk Masyarakat	JTM / JTR		0	0	± 5 kms	2.200.000.000	-	0	± 5 kms	2.500.000.000	-	0		4.700.000.000		
		Jumlah Produksi Listrik	08	- Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan	Jumlah dokumen pengawasan		15 dokumen	200.000.000	15 dokumen	200.000.000	15 dokumen	200.000.000	15 dokumen	200.000.000	15 dokumen	200.000.000		1.000.000.000		
Meningkatkan upaya koordinasi birokrasi (good governance) serta pelaksanaan pertambangan dan energi yang berbasis "good mining practice".	Mewujudkan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan energi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Perusahaan lingkup Pertambangan dan Energi	33	Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP batubara menjadi 886 milyar rupiah melalui peningkatan produksi batubara 122 juta ton pada Tahun 2018	Nilai PNBP Pertambangan (Royalti & Landrent) 438 milyar rupiah; produksi batubara 84,81 juta ton	152 Milyar Rupiah ; 23,13 juta ton	500.000.000	164 Milyar Rupiah ; 24,5 juta ton	600.000.000	176 Milyar Rupiah ; 23,8 juta ton	600.000.000	190 Milyar Rupiah ; 25,2 juta ton	600.000.000	204 Milyar Rupiah ; 26 juta ton	600.000.000		2.900.000.000		
			02	- Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan		7 dokumen	400.000.000	7 dokumen	400.000.000	7 dokumen	400.000.000	7 dokumen	400.000.000	7 dokumen	400.000.000		2.000.000.000		
			05	- Pembinaan Pengelolaan CSR Perusahaan Pertambangan	Jumlah kabupaten yang mengelola CSR		3 Kabupaten	100.000.000	3 Kabupaten	200.000.000	3 Kabupaten	200.000.000	3 Kabupaten	200.000.000	3 Kabupaten	200.000.000		900.000.000		
			35	Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP migas menjadi 5,7 triliun rupiah; lifting minyak bumi 136,5 juta barel; lifting gas bumi 3 milyar MMBTU pada 2018	PNBP migas 3,6 triliun rupiah; lifting minyak bumi 132,24 juta barel; lifting gas bumi 2,7 milyar MMBTU	1,03 Trilyun Rupiah; 26,90 ribu barrel minyak bumi; 609 MMBTU gas bumi	200.000.000	1,08 Trilyun Rupiah; 27,11 ribu barrel minyak bumi; 613 MMBTU gas bumi	700.000.000	1,14 Trilyun Rupiah; 27,32 ribu barrel minyak bumi; 617 MMBTU gas bumi	700.000.000	1,2 Trilyun Rupiah; 27,5 ribu barrel minyak bumi; 621 MMBTU gas bumi	700.000.000	1,27 Trilyun Rupiah; 27,7 ribu barrel minyak bumi; 626 MMBTU gas bumi	700.000.000		3.000.000.000		
			03	- Pengawasan Terpadu Hilir Migas	Jumlah dokumen pengawasan dan pemantauan K3LL, SPBU, distribusi BBM dan dll		14 dokumen	200.000.000	14 dokumen	300.000.000	14 dokumen	300.000.000	14 dokumen	300.000.000	14 dokumen	300.000.000		1.400.000.000		
			04	- Evaluasi Pemanfaatan BBG untuk Transportasi dan Rumah Tangga	Jumlah dokumen evaluasi		-	0	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000		1.600.000.000		
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya data perencanaan dan pelaporan yang representatif		2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	125.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	175.000.000		625.000.000		
			50	- Pengumpulan dan Validasi Data Statistik ESDM	Jumlah buku statistik pertambangan dan energi 2013		300 buku	75.000.000	300 buku	100.000.000	300 buku	125.000.000	300 buku	150.000.000	300 buku	175.000.000		625.000.000		
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya administrasi perkantoran		1 tahun	450.000.000	1 tahun	520.000.000	1 tahun	550.000.000	1 tahun	650.000.000	1 tahun	700.000.000		2.870.000.000		
			75	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi aparatur sektor pertambangan dan energi		12 bulan	450.000.000	12 bulan	520.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	650.000.000	12 bulan	700.000.000		2.870.000.000		
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas SDM aparatur		100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000		305.000.000		
			68	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kebutuhan SDM aparatur yang berkompeten		30 orang	45.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	65.000.000	30 orang	70.000.000	30 orang	75.000.000		305.000.000		
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya data perencanaan dan pelaporan yang representatif		2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	125.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	175.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	750.000.000		
			29	- Rapat Teknis SKPD	Jumlah peserta kab/kota dalam rapat teknis		45 orang	100.000.000	45 orang	125.000.000	45 orang	150.000.000	45 orang	175.000.000	45 orang	200.000.000	45 orang	750.000.000		
			33	Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP batubara menjadi 886 milyar rupiah melalui peningkatan produksi batubara 122 juta ton pada Tahun 2018		152 Milyar Rupiah ; 23,13 juta ton	0	164 Milyar Rupiah ; 23,8 juta ton	100.000.000	176 Milyar Rupiah ; 24,5 juta ton	100.000.000	190 Milyar Rupiah ; 25,2 juta ton	100.000.000	204 Milyar Rupiah ; 26 juta ton	100.000.000		400.000.000		
			01	- Pertemuan Pelaksanaan Inspektur Tambang Daerah dan Nasional	Tersedianya SDM inspektur pertambangan yang berkualitas		-	0	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000		400.000.000		
Mewujudkan Good Governance	Jumlah kebutuhan operasional rutin administrasi perkantoran	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya administrasi perkantoran		1 tahun	1.773.680.000	1 tahun	2.441.000.000	1 tahun	2.331.000.000	1 tahun	2.376.000.000	1 tahun	2.346.000.000		11.267.680.000			
		01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan surat menyurat kantor		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000		100.000.000			
		02	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik		12 bulan	250.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	350.000.000		1.500.000.000			
		06	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas, roda 2: 8 unit dan roda 4: 9 unit		12 bulan	360.000.000	12 bulan	375.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	420.000.000	12 bulan	375.000.000		1.930.000.000			
		07	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah aparatur pengelola keuangan dan barang		13 orang	45.000.000	13 orang	60.000.000	13 orang	60.000.000	13 orang	60.000.000	13 orang	60.000.000		285.000.000			
		08	- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan		3 gedung	250.000.000	3 gedung	275.000.000	3 gedung	275.000.000	3 gedung	275.000.000	3 gedung	275.000.000		1.350.000.000			
		10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK kantor		12 bulan	100.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	120.000.000		590.000.000			
		11	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor		12 bulan	125.000.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	145.000.000		715.000.000			
		15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan kantor		12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000		75.000.000			
		17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat kantor		12 bulan	50.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000		350.000.000			
		19	- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah kebutuhan tenaga outsourcing administrasi dan teknis kantor		28 orang	547.680.000	28 orang	600.000.000	28 orang	600.000.000	28 orang	600.000.000	28 orang	600.000.000		2.947.680.000			
		20	- Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah tutor SKJ untuk 44 kali pertemuan		1 orang	11.000.000	1 orang	11.000.000	1 orang	11.000.000	1 orang	11.000.000	1 orang	11.000.000		55.000.000			
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya penyediaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana kerja		100%	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		600.000.000			
		29	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		-	0	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000		600.000.000			
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur		0%	0	100%	85.000.000	0%	0	0%	0	0%	0		85.000.000			
		04	- Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian seragam korpri		-	0	100 orang	85.000.000	-	0	-	0	-	0		85.000.000			

B	A	B	6	
INDIKATOR KINERJA SESUAI TUJUAN DAN SASARAN				

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 2013-2018, di bawah ini indikator kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014 -2018

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Produksi batubara (juta Ton)	84,81	23,13	23,80	24,50	25,20	26,00	122,63
2	Jumlah penerimaan negara bukan pajak batubara, dana bagi hasil migas dan retribusi dari usaha pertambangan (Rp M)	4.013	1.183	1.250	1.321	1.397	1.476	6.628
3	Jumlah produksi listrik (GWh)	6.678	6.878	7.085	7.298	7.517	7.743	7.743
4	Rasio elektrifikasi (%)	71,55	72,61	73,69	74,79	75,90	77,03	77,03
5	Jumlah pasokan listrik (MW)	1.212,85	1.255,15	1.299,31	1.345,02	1.392,33	1.441,32	1.441,32
6	Persentase desa dengan akses listrik (%)	91,31	92,30	93,16	94,02	94,90	95,78	95,78

B	A	B	7	
PENUTUP				

Rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan komitmen seluruh aparatur dinas sebagai arah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi SKPD selama periode 2013 - 2018. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis sangat bergantung pada kesiapan dan profesionalisme aparat Dinas Pertambangan dan Energi serta dukungan kebijakan dari Gubernur Sumatera Selatan, guna mengantisipasi perubahan kebijakan pusat yang terus mengalami metamorphosis.

Strategi yang dirumuskan hendaknya mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada dengan mengeliminasi dampak resiko dari berbagai faktor yang cenderung dapat mengancam kesinambungan operasional instansi. Sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan terus menggenjot produktivitas sektor agar dapat membantu meningkatkan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, setiap aparatur Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan hendaknya mempedomani beberapa hal, yakni :

1. Integritas PNS sebagai pelayan masyarakat (*fast responsive*)
2. Disiplin kinerja aparatur yang profesional
3. Kerja keras